

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Cetakan ketiga. Yogyakarta; Gadjra Mada University Press.
- Abdul Latif & Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta; Pena Grafika.
- B. Herry Priyono. 2022. *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2018. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Bintan Regen Saragih. 2006. *Politik Hukum*. Bandung; CV. Utomo.
- Bismar Nasution. 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. Bandung; Books Terrace and Library.
- Brian A. Garner. 1984. *Black Law Dictionary*. New York; WW. Norton Company.
- Farida Patittingi & Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Franz Magnis Suseno. 2023. *Etika Politik*. cetakan keduabelas. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- H. L. A. Hart. 2018. *Konsep Hukum*. Nusa Media; Bandung.
- Imam Syaukarni dan A. Ahsin Tohari. 2007. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi cetakan kelima. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- John Rex. 1985. *Analisa Sistem Sosial*. terjemahan drs. Simamora. Jakarta; Bina Aksara.
- Jimy Asshiddiqie. 2010. *Kontitusi dan Konsitusionalisme Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*, cetakan ke- 2. Jakarta; Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Lawrence M. Friedman. 2020. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung; Nusa Media.
- Lilik Mulyadi. 2020. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Kencana.
- Moh. Mahfud MD. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- _____. 2017. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miriam Budiardjo. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; Gramedia Pustaka.
- M. Solly Lubis. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung; Bandar Maju.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Ni'Matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta; UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Purwaning M. Yuniar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung; Alumni.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Raharjo. 2010. *Penegakan Hukum Responsif*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung; Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2008 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta; Bhatara Karya Sastra.
- Sri Soemantri Matosowigno. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung; Alumni.

- _____. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- _____. 2020. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. cetakan kedua puluh tujuh. Depok; Rajawali Press.
- Soehino. 2018. *Ilmu Negara*, edisi kedua cetakan pertama, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunsi Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Cetakan Pertama. Depok; Rajawali Pers.
- Zainal Arifin Mochtar. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta; EA Books.

Tesis

- Handoyo Prihatanto. 2009. *Politik Hukum Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) terkait dengan Asas Hal Ikhwil Kegentingan Memaksa (Analisis terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2007)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Ari Purwadi. 1990. *Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 3 Nomor 20, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia. doi <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.900>.
- Adji Samekto, 2013. *Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 13 Nomor 1. Purwokerto; Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. doi <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.157>.
- Aidul Fitriciada Azhari. 2012. *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, volume 10 Nomor 4, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Bismar Nasution. 2017. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture*. Integritas. Jakarta; KPK.
- Dadang Siswanto. 2013. *Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 42 Nomor 1. Semarang; Fakultas Hukum Diponegoro.
- Eddy Oemar Sharif Hiariej. 2019. *United Nation Convention Againsts Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Mimbar Hukum. Volume 31 Nomor 1. Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. doi <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Elwi Danil dan Iwan Kurniawan. 2017. *Optimalizing Confiscation of Asset in Accelerating the Eradication of Corruption*. Hasanuddin Law Review. Volume 3 Nomor 1. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Febby Mutiara Nelson dan Topo Santoso. 2021. *Principle of Simple, Speedy, and Law-Cost Trial and Problem of Asset Recovery in Indonesia*. Indonesia Law Review. Volume 11 Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hugh Evander Willis. 1926. *A Definition of Law*. Virginia Law Review. Volume 12 Nomor 3. Virginia; The Virginia Law Review Association. doi <https://doi.org/10.2307/1065717>.
- Imelda F.K Bureni. 2016. *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 45 Nomor 4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Jonathan S. Gould. 2022. *Puzzles of Progressive Constitutionalism*. Harvard Law Review. Volume 135 Nomor 8. Cambridge; The Harvard Law Review Publishing Asosiation. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4134733>.
- Jon S.T. Quah. 2022. *Leadership and culture in combating corruption: a comparative analysis*. Public Administration and Policy. Volume 25 nomor 2. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0043>.
- Jon S.T. Quah, 2021. *Breaking the cycle of failure in combating corruption in Asian countries*. Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Volume 21 Nomor 2. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2021-0034>.

- Maskun. 2014. *Combating Corruption Based on International Rules*. Indonesia Law Review. Volume 4 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nanda Riski Saputra dan Rosa Linda. 2022. *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial*. Integritas. Volume 8 Nomor 1. Jakarta: KPK. doi <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Puteri Hikmawati. "Politik Hukum Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". dalam Didit Hariadi Estiko dan Novianto M. Hantoro (ed). 2000. *Reformasi Hukum Nasional, Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Produk Pemerintahan Transisi 1998-1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Refki Saputra. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Convention Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas. Volume 3 Nomor 1. Jakarta: KPK.
- Roscoe Pound. 1912. *Theories of Law*, *The Yale Law Journal*, Volume 22 Nomor 2. New Heaven; The Yale Law Company Journal. doi <https://doi.org/10.2307/785649>.
- Syahriza Alkohir Anggoro. 2019. *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 10 Nomor 1. Malang; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. doi <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Laporan

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2009. *Lapooran Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Diky Anandya. Kurnia Ramadhana. Laola Easter. 2022. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta; Indonesia Corruption Watch.

Diky Anandya dan Laola Easter. 2023. *Laporan Hasil Pemantauan: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

United Nation Office on Drugs and Crime. 2004. *United Nation Convention Againsts Corruption*. New York; United Nation.

Opini

Bambang Koesowo. 2023. *Dilema Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana*. Kompas: Kompas.id. 23 Mei 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/22/dilema-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana?open_from=Search_Result_Page.

Zainal Arifin Mochtar, 2023. *Penurunan Terprediksi IPK Indonesia*. Media Indonesia. Edisi 6 Februari 2023

_____. 2019. *Politik Hukum Anti Korupsi*. Kompas. Edisi tanggal 25 September 2019.

Berita

Abdul Manan. dkk. ed. 2023, "Reformasi", Tempo, Edisi 22-28 Mei 2023, hlm. 36.

Achmad Nasrudin Yahya., ed. "Nasib RUU Perampasan Aset: 6 Kali Rapat Paripurna DPR, Supres Tak Kunjung Diproses". Kompas, 21 Juni 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/21/05300061/nasib-ruu-perampasan-aset-6-kali-rapat-paripurna-dpr-surpres-tak-kunjung?page=all#page2>.

Andika Dwi., ed. "Kisah Mahfud MD Bongkar Aliran Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 349 Triliun Sebelum jadi Cawapres Ganjar Pranowo". Tempo. 18 Oktober 2023. https://bisnis.tempo.co/read/1785631/kisah-mahfud-md-bongkar-aliran-transaksi-janggal-kemenkeu-rp-349-triliun-sebelum-jadi-cawapres-ganjar-pranowo?page_num=3.

Cyprianus Anto Saptowalyono dan Denty Piawai Nastitie. ed., *Beri Efek Jera Koruptor, Presiden Desak Segera Sahkan RUU Perampasan Aset*. Kompas: Kompas.id. 12 Desember 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/12/beri-efek-jera-koruptor-presiden-desak-segera-sahkan-ruu-perampasan-aset?open_from=Section_Artikel_Terkait

Dian Dewi Purnamasari., ed. *UNCAC Soroti Belum Tuntasnya RUU Perampasan Aset*. Kompas: Kompas.id. 13 November 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/13/uncac-soroti-penyelesaian-ruu-perampasan-aset?open_from=Search_Result_Page.

Dian Erika Nugraheny dan Sabrina Asril., ed. "Supres RUU Perampasan Aset Dikirim ke DPR Sejak Jumat". Kompas, 8 Mei 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/19062981/surpres-ruu-perampasan-aset-dikirim-ke-dpr-sejak-jumat>.

DAA. DTA. Dimas., ed. 2023. *Grafik: Pembahasan RUU Perampasan Aset*. Kompas. 10 April 2023.

Dwi Rahmawati., ed. "Supres RUU Perampasan Aset Masuk DPR, Ini Mekanisme Selanjutnya". Detik News. 8 Mei 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6709432/surpres-ruu-perampasan-aset-masuk-dpr-ini-mekanisme-selanjutnya>.

Gianie., ed. 2023. *Pengejaran Aset Eks BLBI Mendekati Akhir*. Kompas: Kompas.id. 12 Juli 2023.

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/11/pengejaran-aset-eks-blbi-mendekati-akhir?open_from=Search_Result_Page

ICW. 2007. *Pengembalian Aset Kotupsi Via Instrumen Perdata*. ICW. 1 Agustus 2007. <https://antikorupsi.org/id/article/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata>.

Irfan Amin., ed. “DPR Ungkap Alasan RUU Perampasan Aset Belum Dibahas di Paripurna”. Tirto.id. 20 Juni 2023 <https://tirto.id/dpr-ungkap-alasan-ruu-perampasan-aset-belum-dibahas-di-paripurna-gMfi>.

Mys., ed. 2005. *Suhadibroto: Sulit Menggugat Korupsi Secara Perdata*. Hukum Online. 9 Februari 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor-secara-perdata-hol12178/>.

Nurhadi., ed. “Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset”. Tempo. 18 April 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1857862/kembali-disinggung-presiden-jokowi-apa-kabar-ruu-perampasan-aset>.

Restu Diantina., ed. 2021. *Mahfud: Kerugian Negara Kasus BLBI Hampir Rp110 Triliun*. Tirto.id. 12 April 2021. <https://tirto.id/mahfud-kerugian-negara-akibat-kasus-blbi-hampir-rp110-triliun-gccN>.

Syakirun Ni’am dan Bagus Santosa., ed. “KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka TPPU”. Kompas. 10 Mei 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/12284401/kpk-tetapkan-rafael-alun-tersangka-tppu>.

Tempo. 2021. *Jalan Berliku Penanganan Skandal BLBI*. Koran Tempo. 14 April 2021.

Kamus

Camridge Dictionary. Camridge University. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Oxford Learner’s Dictionary. Oxford University Press. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>.

Sumber Internet Lainnya

Dian Ediana. 2021. *"Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset untuk Menyokong Agenda Pemberantasan Korupsi"*. Youtube: Sahabat ICW. 9 April 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=l6gvupqVQAs>.

KompasTV. *"Bambang Pacul Soal Jokowi Dorong RUU Pembatasan Uang Karta: DPR Nangis Semua"*. Youtube: KompasTV. 3 April 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=w799jVXFxRE>.

Mahfud MD. 2017. *"Prof. Mohammad Mahfud M.D. dalam Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Eksekutif"*. Youtube: Sekolah Tinggi Hukum Jentera. 17 Februari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=IN74UYDUMVY>.

Zainal Arifin Mochtar 2022. *"Zainal Arifin Mochtar "Ada 4 Faktor yang Penting dalam Proses Politik Hukum"*. Youtube: Advokat Kontitusi. 5 November 2022 <https://www.youtube.com/watch?v=tJnkplAooZk>.